

JURNAL ILMIAH

ILMU KEPENDIDIKAN DAN KEDAKWAHAN

Implementasi Pendidikan Berbasis Karakter
Melalui Program Kantin Kejujuran pada Sekolah-
Sekolah di Provinsi Kalimantan Selatan

Ahmad Salabi

Pendidikan Anak Dalam Keluarga

Syaiful Bahri Djamarah

Pendidikan Islam di Indonesia (Suatu Kajian
Upaya Pemberdayaan dan Rekonstruksi)

H. Mohammad Arief

Urgensi Pembelajaran Pendidikan Alquran

H. Abd. Basir

Supervisi Pendidikan Dalam Rangka
Meningkatkan Profesionalisme Guru

Muhniansyah

Dakwah dan Pembinaan Aqidah Remaja

Sulhan

Kedudukan Hadits Tentang Isra Mi'raj

Tamjidnur



Diterbitkan Oleh :

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
(STAI) AL WASHLIYAH BARABAI**

Jl. Keramat Manjang Barabai HST Provinsi Kal - Sel Telp/Fax. (0517) 41529
Kode Pos 71351 email : alwashliyah_stai_brb@yahoo.co.id

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN BERBASIS KARAKTER MELALUI PROGRAM KANTIN KEJUJURAN PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Oleh Ahmad Salabi*

Abstrak : Sebuah sekolah, seharusnya tidak hanya menjadi tempat belajar, namun juga menjadi tempat memperoleh pendidikan, termasuk pendidikan karakter. Sekolah pada hakikatnya bukanlah tempat guru menyampaikan pengetahuan melalui berbagai mata pelajaran saja, namun sekolah juga adalah lembaga yang melakukan usaha dan proses pembelajaran yang berorientasi pada nilai. Pembentukan dan pendidikan karakter melalui sekolah merupakan usaha mulia yang mendesak untuk dilakukan. Sekolah bertanggung jawab bukan hanya dalam mencetak peserta didik yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga dalam karakter dan kepribadian.

Kata Kunci Pendidikan Karakter, Kantin Kejujuran

A. Pendahuluan

Sejak beberapa tahun yang lalu penyelenggara pendidikan baik sekolah negeri maupun swasta, menyelenggarakan Pendidikan Karakter. Pendidikan ini berkembang karena para pakar pendidikan di Indonesia mengakui bahwa sistem pendidikan yang telah ada, khususnya dalam bidang kepribadian (karakter) telah gagal

* Penulis adalah Dosen Tetap pada Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin, Jurusan Kependidikan Islam (KI), Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI), Alumni Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang (UM) Program Studi Manajemen Pendidikan.

dilakukan. Gagalnya pendidikan di Indonesia menghasilkan manusia yang kurang berkarakter masih bisa diperdebatkan. Asumsi kegagalan ini setidaknya diperkuat oleh pendapat I Ketut Sumarta, seorang yang telah lama bergelut dalam dunia pendidikan dalam bukunya yang berjudul "*Pendidikan yang Memekarkan Rasa*". Sumarta mengatakan: "Pendidikan nasional kita cenderung hanya menonjolkan pembentukan kecerdasan berpikir dan menepikan penempatan kecerdasan rasa, kecerdasan budi, bahkan kecerdasan batin. Dari sini lahirlah manusia manusia yang berotak pintar, manusia berprestasi secara kuantitatif akademik, namun tidak berkecerdasan budi sekaligus sangat berkegantungan, tidak merdeka mandiri". (Djujun Djaenudin Supriadi : 2009) Nomor 25Tahun ke VII.)

Kutipan di atas menunjukkan bahwa telah terjadi ketidakpuasan atau cenderung terjadinya kegagalan dalam dunia pendidikan dalam rangka membentuk manusia dewasa dan berwatak mandiri. Kegagalan membentuk manusia dewasa dan berwatak mandiri ini kemudian diatasi atau diperkecil dengan melakukan program pendidikan karakter.

Kurang berhasilnya sistem pendidikan membentuk sumber daya manusia dengan karakter yang tangguh, berbudi pekerti luhur, bertanggung jawab, berdisiplin, dan mandiri, terjadi hampir di semua lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta. Lebih jauh upaya *nation character building* sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia terkesan tidak berjalan seperti yang diinginkan. Lembaga-lembaga pendidikan baik yang bersifat umum maupun yang berlandaskan nilai-nilai agama berupaya sedapat mungkin menanamkan dan mengembangkan karakter siswanya sesuai dengan nilai-nilai universal yang berlaku. (Djujun Djaenudin Supriadi : 2009) Nomor 25Tahun ke VII.)

Sekolah sebagai institusi formal yang memiliki tugas penting bukan hanya untuk meningkatkan penguasaan informasi

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN... *Ahmad Salabi

dan teknologi dari peserta didik, tetapi juga bertugas dalam pembentukan kapasitas bertanggungjawab dan kapasitas pengambilan keputusan yang bijak dalam kehidupan. Hal ini seperti yang dinyatakan seorang Bapak Pendidikan, Horace Mann (1837): "*the highest and noblest office of education pertains to our moral nature. The common school should teach virtue before knowledge, for knowledge without virtue poses its own dangers*". (Triyo Supriyatno. 2009. **Error! Hyperlink reference not valid.** [Karakterpendidikan-karakter-di-sekolah.html](#). (Diakses Tanggal 03 November 2010). Horace Mann (1796-1859) mempunyai pandangan bahwa sekolah negeri haruslah menjadi penggerak utama dalam pendidikan yang bebas (*free public education*), dimana pendidikan sebaiknya bersifat universal, tidak memihak (*non sectarian*), dan bebas. Oleh karena itu, Horace Mann maupun John Dewey, seorang filsuf pendidikan berpendapat bahwa tujuan utama pendidikan adalah sebagai penggerak efisiensi sosial, pembentuk kebijakan berkewarganegaraan (*civic virtue*) dan penciptaan manusia berkarakter, jadi bukan untuk kepentingan salah satu pihak tertentu (*sectarian ends*).

Kegagalan pendekatan *moral reasoning* dan *values clarification* yang mulai dirasakan akibatnya pada demoralisasi masyarakat di era tahun 90-an telah membuat titik balik dalam pendidikan moral di Amerika Serikat. Berdasarkan kenyataan itulah maka pada tahun 1992 para ahli pendidikan, pemimpin remaja, dan sarjana etik (*ethics scholars*) yang menaruh perhatian pada kondisi ini melakukan pertemuan di Aspen, Colorado dan menghasilkan deklarasi Aspen yang berisi antara lain keyakinan bahwa generasi berikutnya adalah penentu bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga masyarakat memerlukan warga negara yang baik (*caring citizenry*) dengan karakter moral yang baik pula. Mereka juga yakin bahwa seseorang tidak secara otomatis memiliki karakter moral yang baik sehingga perlu

Ahmad Salabi ...
dipikirkan upaya untuk mendidik karakter secara efektif (*effective character education*). (Triyo Supriyatno.: 2009 : 5)

Untuk itulah kemudian disusun suatu model baru dalam pendidikan moral yang berujung pada pendidikan karakter agar penyakit yang berada dalam masyarakat Amerika maupun negara manapun di belahan bumi ini dapat diobati. Brooks dan Goble menyarankan dalam bukunya "*The Case for Character Education*" agar sistem pendidikan moral tidak lagi memikirkan tentang *nilai-nilai siapa* yang akan diajarkan pada siswa di sekolah, akan tetapi perlu dipikirkan adalah *nilai-nilai apa* yang akan diajarkan pada siswa (*what values should we teach?*). Brooks & Goble juga menekankan bahwa agama-agama besar di Amerika telah memiliki kesamaan dalam hal pendidikan karakter dan mempunyai nilai-nilai luhur yang dapat ditemukan dalam masing-masing ajaran agamanya.

Menurut William Bennett sekolah mempunyai peran yang amat penting dalam pendidikan karakter anak, terutama jika anak-anak tidak mendapatkan pendidikan karakter di rumah. Argumennya didasarkan kenyataan bahwa anak-anak Amerika menghabiskan cukup banyak waktu di sekolah, dan apa yang terekam dalam memori anak-anak di sekolah akan mempengaruhi kepribadian anak ketika dewasa kelak.

Di Indonesia pelajaran mengenai agama yang mengandung nilai moral diajarkan di sekolah-sekolah. Faktanya, pendidikan moral masih belum berhasil. Hal ini dapat dilihat dari parameter kejahatan dan demoralisasi masyarakat yang tampak meningkat. Jika dilihat dari esensi pendidikan agama yang tertuang pada kurikulum pendidikan agama, tampaknya agama lebih mengajarkan pada dasar-dasar agama, sementara akhlak atau kandungan nilai-nilai kebaikan belum sepenuhnya disampaikan. Dilihat dari metode pendidikan pun tampaknya terjadi kelemahan karena metode pendidikan yang disampaikan difokuskan pada pendekatan otak kiri atau kognitif. Metode ini hanya mewajibkan peserta didik

untuk mengetahui dan menghafal (*memorization*) konsep dan kebenaran tanpa menyentuh perasaan, emosi, dan nuraninya. (Triyo Supriyatno.: 2009 : 7)

Selain itu tidak dilakukan praktek perilaku dan penerapan nilai kebaikan dan akhlak mulia dalam kehidupan di sekolah. Ini merupakan kesalahan metodologis yang mendasar dalam pengajaran moral bagi peserta didik. Karena itu tidaklah aneh jika dijumpai banyak sekali inkonsistensi antara apa yang diajarkan di sekolah dan apa yang diterapkan anak di luar sekolah. Dengan demikian peran orangtua dalam pendidikan agama untuk membentuk karakter anak (baca: *akhlak*) menjadi amat mutlak. Melalui kedua institusi inilah anak memperoleh kesinambungan nilai-nilai kebaikan yang telah ketahui di sekolah. Tanpa keterlibatan orangtua dan keluarga maka sebaik apapun nilai-nilai yang diajarkan di sekolah akan menjadi sia-sia. Hal ini dikarenakan pendidikan karakter (atau akhlak dalam Islam) harus mengandung unsur afeksi, perasaan, sentuhan nurani, dan sekaligus prakteknya dalam bentuk amalan kehidupan sehari-hari. (Triyo Supriyatno.: 2009 : 8-9)

Pendidikan karakter hanya akan menjadi sekadar wacana jika tidak dipahami secara lebih utuh dan menyeluruh dalam konteks pendidikan nasional kita. Pendidikan karakter yang dipahami secara parsial dan tidak tepat sasaran justru malah bersifat kontraproduktif bagi pembentukan karakter anak didik. Pendekatan parsial yang tidak didasari pendekatan pedagogi yang kokoh tidak akan mampu menanamkan nilai-nilai keutamaan dalam diri anak, malah akan menjerumuskan mereka pada perilaku kurang bermoral. Selama ini, jika kita berbicara tentang pendidikan karakter, yang kita bicarakan sesungguhnya adalah sebuah proses penanaman nilai yang sering kali dipahami secara sempit, hanya terbatas pada ruang kelas, dan sering kali pendekatan ini tidak didasari prinsip pedagogi pendidikan yang kokoh. (Doni Koesoema. 2010. Pendidikan Karakter Integral.

<http://Pendidikan%20Karakter/Pendidikan.Karakter.Integral.htm>.

(Diakses Kamis, 11 Februari 2010 | 10:24 WIB) Sebagai contoh, untuk menanamkan nilai kejujuran, banyak sekolah beramai-ramai membuat kantin kejujuran. Di sini, anak diajak untuk jujur dalam membeli dan membayar barang yang dibeli tanpa ada yang mengontrolnya.

Pelaksanaan pendidikan karakter yang seperti ini diharapkan anak-anak akan menghayati nilai kejujuran dalam hidup mereka. Namun sayang, gagasan yang tampaknya relevan dalam mengembangkan nilai kejujuran ini mengabaikan prinsip dasar pedagogi pendidikan berupa kedisiplinan sosial yang mampu mengarahkan dan membentuk pribadi anak didik. Alih-alih mendidik anak menjadi jujur, di banyak tempat anak yang baik malah tergoda menjadi pencuri dan kantin kejujuran malah bangkrut. Ini terjadi karena kultur kejujuran yang ingin dibentuk tidak disertai dengan pembangunan perangkat sosial yang dibutuhkan dalam kehidupan bersama. Tiap orang bisa tergoda menjadi pencuri jika ada kesempatan.

Sejak pertama berdiri, kantin kejujuran yang dipelopori Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2008, kini sudah berdiri lebih dari 7,456 buah yang tersebar di 23 Provinsi di Indonesia. Di Kalimantan Selatan, sejak tahun 2009 sudah berdiri puluhan kantin kejujuran tersebar di 13 Kabupaten, ada yang dibawah binaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan ada yang dibawah binaan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Kantin kejujuran yang dibawah binaan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 20 buah yang terdiri 10 buah di Kota Banjarmasin, 6 buah di Kota Banjarbaru dan 4 buah di Kabupaten Banjar. (Data dari Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan 2009) Untuk tingkat sekolah maka saat ini sudah ada 200 buah kantin kejujuran yang tersebar disekolah baik tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Tiga buah kantin kejujuran yang dicanangkan merupakan kerjasama antara Forum Karang Taruna dan Kejaksaan

Tinggi Kalimantan Selatan, sekaligus pencanangan Gerakan Aksi Langsung Anti Korupsi Sejak Dini (Galaksi) oleh Jaksa Agung Republik Indonesia. (Data dari Biro Humas Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Edisi Minggu, 09 Mei 2010)

Salah satu upaya menanamkan pendidikan karakter dimaksud adalah lewat kantin kejujuran diberbagai sekolah. Kantin kejujuran adalah kantin yang menjual makanan kecil dan minuman, kantin kejujuran ini tidak memiliki penjual dan juga tidak dijaga. Makanan atau minuman dipajang dalam warung, di sana disediakan kotak uang yang berguna untuk menampung pembayaran dari siswa yang membeli makanan atau minuman. Bila ada uang kembalian, siswa mengambil dan menghitung sendiri uang kembalian dari dalam kotak tersebut. Melalui kantin kejujuran ini siswa belajar berperilaku jujur, siswa belajar bersikap taat dan patuh ketika tidak ada orang yang mengawasi. Belajar jujur pada diri sendiri inilah inti sebuah pendidikan karakter yang langsung menyentuh domain afektif dan psikomotorik.

B. Metode Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan bagaimana implementasi pendidikan berbasis karakter melalui program kantin kejujuran tersebut, maka diperlukan pengamatan yang mendalam dalam situasi yang wajar (*natural setting*) yang dikenal dengan pendekatan kualitatif. (Bogdan, R.C., & Biklen, S.K. 1982) Menurut Yin, fokus penelitian yang ingin menjawab pertanyaan *bagaimana* seperti ini lebih bersifat eksplanatori dan lebih mengarah kepada penggunaan strategi studi kasus. Guna menyelenggarakan penelitian yang menggunakan strategi studi kasus ini maka disusunlah rancangan studi kasus. (Yin, R.K. 1997) Penyusunan rancangan studi kasus dilakukan sebagai upaya pertanggung jawaban ilmiah penelitian yang berkenaan dengan kaitan logis antara pertanyaan yang diajukan, pengumpulan data yang relevan, dan penganalisisan hasilnya. Kelebihan dari

rancangan studi kasus ini bertujuan untuk memungkinkan peneliti untuk mempertahankan karakteristik holistik bagi kebermaknaan dari peristiwa-peristiwa nyata yang diamati.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menggambarkan secara deskriptif eksploratif keberadaan kantin kejujuran beserta usaha-usaha penerapan pendidikan berbasis karakter, serta bagaimana peran pihak sekolah dalam pelaksanaan pendidikan berbasis karakter melalui kantin kejujuran pada sekolah-sekolah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Menyadari latar karakteristik subyek ini dan agar data hasil penelitian dapat terungkap dan benar-benar valid, maka dibutuhkan kegiatan pengamatan yang mendalam. Dengan situasi seperti ini Marshall & Rossman menyarankan sebaiknya penelitian jenis tersebut menggunakan pendekatan secara kualitatif. Bogdan & Biklen memberikan ciri khusus dari penelitian kualitatif ini, yaitu: (1) penelitian kualitatif memiliki latar yang alami sebagai sumber, dan peneliti dipandang sebagai instrument kunci; (2) penelitian kualitatif bersifat deskriptif; (3) penelitian kualitatif lebih memperhatikan proses dan hasil atau produk; (4) penelitian kualitatif cenderung menganalisis datanya secara induktif; dan (5) makna merupakan soal yang esensial untuk rancangan penelitian kualitatif. (Bogdan, R.C., & Biklen, S.K. 1982)

Penelitian ini dilakukan secara dinamis dan bertahap serta terjalin secara terus menerus. Oleh karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka teknik sampling penelitian ini digunakan secara purposif (*purposefull sampling*). Untuk memperoleh kedalaman dan keabsahan data ini dicari informan kunci (*key informant*) yang dapat memberi informasi kepada peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. (Spradley, J.P. : 1980)

Untuk memperoleh data secara holistik yang integratif, dan memperhatikan relevansi data berdasarkan fokus dan tujuan maka (1) wawancara

partisipan (*participant observation*); dan (3) studi dokumentasi (*study of document*).

C. Hasil Temuan dan Pembahasan

Adanya kantin kejujuran di lembaga pendidikan seperti sekolah dan atau madrasah merupakan fenomena baru dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Program ini bukannya tanpa alasan, lewat kantin kejujuran ini diharapkan dapat melatih siswa dan warga sekolah lainnya untuk bisa bersikap jujur dalam segala hal, termasuk ketika bertransaksi di kantin yang memang tidak dijaga. Diharapkan para pembeli di kantin ini tentunya adalah para siswa dan guru yang memiliki rasa keimanan di dada dan harus menguasai matematika, minimal aritmatika dasar penambahan dan perkalian agar tidak keliru dalam membayar sejumlah uang sesuai dengan makanan, minuman, dan camilan yang mereka konsumsi, serta berapa kembaliannya. (Rizali, A., Sidi, I. Dj., & Dharma, S. : 2009 : 147) Lewat kantin kejujuran ini pula diharapkan setiap individu yang ada di sekolah dilatih untuk memiliki dan menerapkan nilai-nilai luhur atau karakter-karakter yang kuat, tidak hanya di sekolah tapi juga di lingkungan keluarga dan di masyarakat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3, yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil.

Menurut Suyanto, karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang dibuatnya. Terdapat sembilan pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu: (1) karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya; (2) kemandirian dan tanggungjawab; (3) kejujuran/amanah, diplomatis; (4) hormat dan santun; (5) dermawan, suka tolong-menolong dan gotong royong/kerjasama; (6) percaya diri dan pekerja keras; (7) kepemimpinan dan keadilan; (8) baik dan rendah hati, dan; (9) karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Kesembilan pilar karakter itu, diajarkan secara sistematis dalam model pendidikan holistik menggunakan metode *knowing the good, feeling the good*, dan *acting the good*. (Suyanto, Urgensi Pendidikan Karakter : (Diakses Kamis, 11 November 2010)

Dasar pendidikan karakter ini, sebaiknya diterapkan sejak usia kanak-kanak atau yang biasa disebut para ahli psikologi sebagai usia emas (*golden age*), karena usia ini terbukti sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 50% variabilitas kecerdasan orang dewasa sudah terjadi ketika anak berusia 4 tahun. Peningkatan 30% berikutnya terjadi pada usia 8 tahun, dan 20% sisanya pada pertengahan atau akhir dasawarsa kedua. Sebuah buku yang berjudul "*Emotional Intelligence and School Success*" dari Joseph Zins dan kawan-kawan tahun 2001 mengkompilasikan berbagai hasil penelitian tentang pengaruh positif kecerdasan emosi anak terhadap keberhasilan di sekolah. Dikatakan bahwa ada sederet faktor-faktor resiko penyebab kegagalan anak di sekolah. Faktor-faktor resiko yang disebutkan ternyata bukan terletak pada kecerdasan otak, tetapi pada karakter, yaitu rasa percaya diri,

kemampuan bekerja sama, kemampuan bergaul, kemampuan berkonsentrasi, rasa empati, dan kemampuan berkomunikasi.

Pendidikan karakter merupakan suatu payung dari berbagai istilah dalam pendidikan yang menggambarkan upaya mengajar siswa dengan tujuan untuk membantu siswa mengembangkan sikap moral, kewarganegaraan, nilai kebaikan, bertingkah laku dan berperilaku (*mannered, behaved*), tidak menipu (*non-bullying*), sehat, kritis, sukses, traditional, compliant dan perilaku yang dapat diterima secara sosial. (http://Character_education.htm. (Diakses Kamis, 11 November 2010) Program pendidikan karakter secara umum terdiri atas 4 variasi pendekatan yang dapat dilakukan secara khusus atau terkombinasi, yaitu: (1) *Cheerleading*; yaitu pendekatan dengan menggunakan poster, baner atau papan buletin untuk menampilkan nilai-nilai atau hal-hal yang mencerminkan kebaikan yang ditayangkan perbulan, pada kegiatan setiap pagi, dikombinasikan dengan pemberian motivasi secara berkala atau kegiatan tertentu yang memungkinkan dapat dilakukan, misalnya penggalangan dana untuk tujuan yang dijadikan misi dari kegiatan; (2) *Praise and Reward*; pendekatan ini berupaya mengembangkan nilai-nilai kebaikan menjadi suatu kebiasaan dengan menggunakan pengukuh positif. Kegiatan yang dikembangkan meliputi "menemukan siswa yang berbuat baik" untuk kemudian diberi penghargaan atau memberi mereka sesuatu yang dapat ditukarkan dengan privileges atau hadiah. Dalam pendekatan ini, sering kali tindakan signifikan siswa akan hilang ketika pengukuh atau hadiah menjadi fokus utama; (3) *Define and Drill*; pendekatan ini meminta siswa untuk mengingat dan membuat daftar nilai dan mendefinisikannya, hal sederhana ini tampaknya akan *equated* dengan perkembangan lebih jauh dan yang lebih kompleks bagi siswa untuk membuat keputusan moral; (4) *Forced Formality*; pendekatan ini berfokus pada hal yang *strict*, kesepakatan yang seragam dengan aturan khusus yang mesti dituruti (misalnya mengantri, sikap duduk yang baik) atau bentuk perilaku formal

... KASIPENDIDIKAN...

(seperti sapaan pada guru) atau prosedur-prosedur lain untuk diterapkan atau menghormati orang yang lebih dewasa.

Empat pendekatan di atas bertujuan untuk membentuk perilaku secara cepat, dan membantu siswa untuk lebih memahami atau memiliki komitmen pada nilai-nilai utama yang berlaku di masyarakat, atau membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan agar dapat diterapkan dalam situasi kehidupan yang kompleks.

Pemerintah negara dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional mengembangkan *grand design* pendidikan karakter untuk setiap jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan. *Grand design* menjadi rujukan konseptual dan operasional pengembangan pelaksanaan, dan penilaian pada setiap jalur dan jenjang pendidikan. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural tersebut dikelompokkan dalam: Olah Hati (*Spiritual and emotional development*), Olah Pikir (*intellectual development*), Olah Raga dan Kinestetik (*Physical and Kinesthetic Development*), dan Olah Rasa dan Karsa (*Affective and Creativity development*). <http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/08/20/pendidikan-karakter-di-smp>. (Diakses Hari Kamis, 11 November 2010) Pada jenjang Sekolah Dasar persinya mencapai 60 persen dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Hal ini agar lebih mudah diajarkan dan melekat di jiwa anak-anak itu hingga kelak dewasa. <http://www.antarane.ws.com/berita/1273933824/mendiknas-penerapan-pendidikan-karakter-dimulai-sd>. (Diakses Hari Kamis 11 November 2010)

Istilah karakter baru dipakai secara khusus dalam konteks pendidikan pada akhir abad ke-18. Pencetusnya F.W. Foerster. Terminologi ini mengacu pada sebuah pendekatan idealis spiritualis dalam pendidikan yang juga dikenal dengan teori pendidikan normatif. (Doni Koesoema Albertus. 2007. : 10) dalam

mengembangkan nilai kejujuran ini mengabaikan prinsip dasar pedagogi pendidikan berupa kedisiplinan sosial yang mampu mengarahkan dan membentuk pribadi anak didik.

Lickona menyatakan, terdapat sebelas prinsip agar pendidikan karakter dapat berjalan efektif, yaitu: (1) kembangkan nilai-nilai etika inti dan nilai-nilai kinerja pendukungnya sebagai fondasi; (2) definisikan "karakter" secara komprehensif yang mencakup pikiran, perasaan, dan perilaku; (3) gunakan pendekatan yang komprehensif, disengaja, dan proaktif; (4) ciptakan komunitas sekolah yang penuh perhatian; (5) beri siswa kesempatan untuk melakukan tindakan moral; (6) buat kurikulum akademik yang bermakna dan menantang yang menghormati semua peserta didik, mengembangkan karakter, dan membantu siswa untuk berhasil; (7) Usahakan mendorong motivasi diri siswa; (8) libatkan staf sekolah sebagai komunitas pembelajaran dan moral; (9) tumbuhkan kebersamaan dalam kepemimpinan moral; (10) libatkan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra; dan (11) evaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai pendidik karakter, dan sejauh mana siswa memanifestasikan karakter yang baik.

Agar dapat berjalan efektif, pendidikan karakter dapat dilakukan melalui tiga desain, yakni; (1) Desain berbasis kelas, yang berbasis pada relasi guru sebagai pendidik dan siswa sebagai pembelajar, (2) Desain berbasis kultur sekolah, yang berusaha membangun kultur sekolah yang mampu membentuk karakter anak didik dengan bantuan pranata sosial sekolah agar nilai tertentu terbentuk dan terbatinkan dalam diri siswa, dan (3) Desain berbasis komunitas.

Peran Pihak Sekolah dalam Pelaksanaan Pendidikan Berbasis Karakter

Sejak pertama kali kantin kejujuran dicanangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2008 yang lalu, kini sudah berdiri lebih dari 7.456 buah kantin kejujuran yang tersebar

di 23 provinsi di seluruh Indonesia
(<http://www.nytimes.com/2009/06/16/world/asia/16indo.html>.
(Diakses tanggal 19 September 2010) Untuk wilayah Kalimantan Selatan, sejak tahun 2009 sudah berdiri ratusan buah kantin kejuruan yang tersebar di 13 Kabupaten. Sebagian sekolah berada dibawah binaan Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota dan sebagian dibawah oleh Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. (Data Biro Humas Setda Provinsi Kalimantan Selatan (Edisi Selasa, 14 April 2009) Untuk kantin kejujuran yang dibawah binaan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 20 buah yang terdiri 10 buah di Kota Banjarmasin, 6 buah di Kota Banjarbaru dan 4 buah di Kabupaten Banjar. (Data dari Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan, 2009.) Untuk tingkat sekolah maka saat ini sudah ada 200 buah kantin kejujuran yang tersebar disejumlah sekolah baik tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Tiga buah kantin kejujuran yang dicanangkan merupakan kerjasama antara Forum Karang Taruna dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, sekaligus pencanangan Gerakan Aksi Langsung Anti Korupsi Sejak Dini (Galaksi) oleh Jaksa Agung Republik Indonesia. (Data Biro Humas Setda Provinsi Kalimantan Selatan (Edisi Minggu, 09 Mei 2010)

Pelaksanaan pendidikan karakter melalui sekolah merupakan usaha mulia yang mendesak untuk dilakukan, bahkan sekolah bertanggung jawab bukan hanya dalam mencetak peserta didik yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga dalam karakter dan kepribadian. Hal ini relevan dan kontekstual bukan hanya di negara-negara yang tengah mengalami krisis karakter seperti Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara maju. (Azyumardi Azra : 2002 : 176) Seperti halnya Lee Kwan Yew ketika di tahun pertama menjabat Perdana Menteri Singapura, memprioritaskan membangun jiwa, mental, dan karakter warga negaranya. Setelah memasuki tahun kedua, ia membangun seribu WC umum di seluruh wilayah Singapura, lalu

membeli seribu dompet yang diisi dengan ratusan dolar Singapura dan kemudian sengaja ditempatkan pada seribu WC umum tersebut. (<http://www.batukar.info/komunitas/articles/mereorientasi-pendidikan-karakter-indonesia>. (Diakses Hari Kamis, 11 November 2010)

Pelaksanaan pendidikan berbasis karakter melalui kantin kejujuran di sekolah-sekolah masih sangat bervariasi, tergantung jenjang dan jenis sekolahnya masing-masing, termasuk bagaimana peran pihak sekolah dalam menanamkan nilai-nilai karakter tersebut. Seperti halnya di Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Banjarbaru yang ada di Kawasan Landasan Ulin Utara. Menurut Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum penanaman nilai-nilai karakter kepada para siswa memang sudah menjadi tanggung jawab sekolah, dalam hal ini kepala sekolah memegang peranan penting dalam membiasakan anak-anak berperilaku terpuji baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Kepala sekolah dibantu para guru dan staf selalu menekankan pada *Spiritual Quotient* (SQ), khususnya pada saat apel bendera hari senin selalu diberikan penjelasan akan pentingnya nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, dan sikap saling percaya diantara para siswa. Disamping itu peran setiap wali kelas juga sangat membantu dalam penanaman nilai-nilai karakter ini, sehingga para siswa diharapkan benar-benar mengerti pentingnya nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. (Hasil wawancara dengan Ibu Emi Ambarwaty, Wakasek Bidang Kurikulum Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Banjarbaru. (Senin, 15 November 2010)

Lebih lanjut menurut beliau, penanaman nilai-nilai karakter kepada para siswa melalui kantin kejujuran menurut beliau selama ini berlangsung dengan baik, bahkan bisa dikatakan efektif. Hal ini dapat dilihat dari perilaku siswa tidak pernah ada yang berbuat macam-macam, seperti membuang sampah sembarangan, perilaku tidak disiplin, melanggar tata tertib sekolah, atau perkelahian antar pelajar, pencurian, apalagi masalah penggunaan obat-obatan terlarang yang biasanya banyak dilakukan siswa di perkotaan. Hal

ini menurut analisis beliau karena memang kebanyakan para siswa yang sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Banjarbaru ini berasal dari daerah-daerah lain di sekitar wilayah Landasan Ulin, sedangkan tingkat sosial ekonomi orang tua siswa yang kebanyakan dari tingkat menengah ke bawah, sehingga mereka lebih mudah dibentuk dan diarahkan.

Peran pihak sekolah dalam pendidikan berbasis karakter di sekolah ini selain menjelaskan atau mengklarifikasikan kepada peserta didik secara terus-menerus tentang berbagai nilai yang baik dan yang buruk, juga dengan menerapkan *character-based approach* ke dalam setiap mata pelajaran yang ada di samping mata pelajaran-mata pelajaran khusus untuk pendidikan karakter, seperti pelajaran Agama, Sejarah, Pancasila, dan sebagainya, selain lewat pendekatan *modeling* atau *exemplary* atau *uswah hasanah*, yakni mensosialisasikan dan membiasakan lingkungan sekolah untuk menghidupkan dan menegakkan nilai-nilai akhlak dan moral yang benar melalui model atau teladan. Setiap guru dan tenaga kependidikan lain di lingkungan sekolah harus mampu menjadi contoh yang hidup (*living exemplary*) bagi setiap peserta didik, mereka juga dituntut untuk terbuka dan siap untuk mendiskusikan dengan peserta didik tentang berbagai nilai yang baik tersebut.

Demikian juga halnya dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Martapura yang berada di Komplek Saadah 3 kawasan Sungai Paring, sejak berdiri sampai sekarang program kantin kejujuran masih tetap eksis. Hal ini didukung dengan keinginan-keinginan bahu-membahu dan cukup tanggap dengan keinginan-keinginan warga sekolah khususnya siswa dalam berbelanja lewat kantin kejujuran, sehingga keberadaan kantin ini tidak mengganggu kantin-kantin lain yang ada di lingkungan sekolah.

Menurut pengelola, anak-anak maupun warga sekolah lain yang berbelanja di kantin ini sangat diharapkan kejujurannya, baik dalam mengambil barang maupun dalam membayar uang sesuai dengan label

yang sudah ditentukan. Peran pihak sekolah hanya mengawasi jalannya kantin yang dalam operasionalnya sudah diserahkan kepada para anggota OSIS, sehingga hal ini juga merupakan pembelajaran bagi mereka. (Hasil observasi dan wawancara dengan Ibu Tri Astutik, Guru yang juga diberi kepercayaan mengelola kantin kejujuran "Amanah" di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Martapura. (Senin, 15 November 2010) Selain itu pihak sekolah juga tidak bosan-bosannya memberikan nasihat dan peringatan khususnya lewat apel bendera hari senin, agar para siswa selalu menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji, baik di sekolah maupun di rumah. Khusus mengenai kantin kejujuran para siswa selalu dihimbau untuk selalu berlaku jujur dalam setiap pembelian, khususnya mengenai uang kembalian. Untuk itu kantin sudah menyediakan berbagai macam uang receh untuk keperluan tersebut. Selain itu guru-guru juga diharapkan peran sertanya dalam menanamkan nilai-nilai terpuji setiap kali mengajar dalam kelas, seperti percaya pada kemampuan diri sendiri, tidak mencontek, dan selalu menjaga rasa persaudaraan di antara sesama siswa. Apabila ada diketahui siswa yang tidak jujur membeli di kantin kejujuran, maka pihak Pengelola akan memanggil dan memberi nasihat yang konstruktif untuk penanaman nilai-nilai, agar siswa yang bersangkutan segera menyadari kekeliruannya.

Peran pihak sekolah untuk penanaman pendidikan berbasis karakter lewat kantin kejujuran seperti di Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Banjarbaru dan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Martapura di atas, hampir sama dengan peran pihak sekolah dalam pendidikan berbasis karakter lewat kantin kejujuran di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gambut dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Banjarmasin. Di kedua sekolah tingkat atas ini peran pihak sekolah khususnya guru semakin luas, karena pihak sekolah memberikan kesempatan bagi guru-guru untuk menjadi manajer kelas yang secara kreatif menghidupkan suasana pembelajaran dalam menerjemahkan isi standar kurikulum yang dituntut oleh pusat, sehingga proses penanaman nilai-nilai bisa langsung menyatu dengan mata pelajaran yang diajarkan

November 2010) Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bahwa penanaman nilai untuk anak sekolah dasar perlu peran aktif guru dan kepala sekolah, khususnya bagi anak-anak yang masih duduk di kelas satu, dua, dan tiga. Dengan demikian perlu usaha dan waktu untuk menanamkan nilai, berupa pemahaman-pemahaman, tata cara merawat dan menghidupi nilai-nilai itu, serta bagaimana seorang siswa memiliki kesempatan untuk dapat melatih nilai-nilai tersebut secara nyata. (Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Rosita. Kepala SD yang sedang mengambil pendidikan Strata 2 di Universitas Lambung Mangkurat. (Jum`at, 26 November 2010)

D. Penutup

Sebagai akhir dari pembahasan ini, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Kantin kejujuran dicanangkan oleh lembaga kejaksaan bekerjasama dengan kementerian pendidikan dalam rangka pendidikan anti korupsi. Esensi dari pendidikan anti korupsi yaitu pembentukan sikap melalui praktik kejujuran melalui kantin kejujuran. Penelitian ini menemukan bahwa kejujuran merupakan salah satu karakter utama yang perlu dikembangkan di institusi sekolah;
2. Keberhasilan pelaksanaan kantin kejujuran sangat menuntut adanya kesiapan sekolah dalam memfasilitasi pendidikan kejujuran lewat pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pendidikan karakter juga perlu disesuaikan dengan visi dan misi sekolah. Hal ini akan terimplementasi pada bentuk sinergis pendidikan karakter. Peran kepala sekolah dan keterlibatan semua pihak menjadi penentu keberhasilan kantin kejujuran.

Daftar Pustaka

Albertus, Doni Koesoema. *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: PT. Gramedia. 2007.

- Azra, Azyumardi. *Paradigma Baru Pendidikan Rekonstruksi dan Demokratisasi: Media Nusantara*. 2002. Jakarta: PT. Kompas Nasionale
- Bogdan, R.C., & Biklen, S.K. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon, Inc. 1982.
- Chaniago, Sam Mukhtar & Tarwiyah, Tuti. *Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2006.
- Danim, Sudarwan. *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- Denzin, N.K., & Lincoln, Y.S. *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, California: SAGE Publishing, Inc. 1994.
- Miles, M.B., & Huberman, A.M. *Qualitative Data Analysis: A Sources Book of New Methods*. Beverly Hills, CA: SAGE Publications, Inc. 1984.
- Moeleong, L.J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1990.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito. 1996.
- Naim, Ngainun. *Rekonstruksi Pendidikan Nasional: Membangun Paradigma yang Mencerahkan*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Rembangy, Musthofa. *Pendidikan Transformatif: Pergulatan Kritis Merumuskan Pendidikan di Tengah Pusaran Arus Globalisasi*. Yogyakarta: Teras. 2008.
- Rizali, A., Sidi, I. Dj., & Dharma, S. Pendidikan Anti Korupsi. Dalam Y.B. Sudarmanto (Ed.), *Dari Guru Konvensional Menuju Guru Profesional* (hlm. 144-152). Jakarta: PT. Grasindo. 2009.
- Spradley, J.P. *Participant Observation*. Holt. Rinehart and Winston. 1980.
- Yin, R.K. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1997.